

PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LKjIP

KECAMATAN MARANGKAYU

TAHUN
2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Marangkayu Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan LKjIP Kecamatan Marangkayu Tahun 2025 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan



Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara keseluruhan LKjIP tahun 2026 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD sesuai Renstra Perubahan tahun 2025-2029 telah dilaksanakan dengan baik. Meskipun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi dan ditingkatkan di masa yang akan datang, sehingga kita dapat mewujudkan visi, misi, dan sasaran yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Renstra Perubahan Kecamatan Marangkayu Hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Good Governance dan Clean Government.

Pada akhirnya laporan ini kiranya dapat memberi manfaat yang optimal bagi peningkatan kinerja dimasa mendatang dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi khususnya Kecamatan Marangkayu Semoga LKjIP Kecamatan Marangkayu ini juga dapat berguna sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Marangkayu

Tanggal : 23 Februari 2026

CAMAT



H.AR.AMBO DALLE, S.Sos, M.H
NIP. 196907212001121003



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Marangkayu berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis suatu organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur dan dapat diujikan diandalkan.

Berdasarkan saran dan arahan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Suatu indikator kinerja tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan tersebut sebagai suatu perkiraan. Dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran yang tetap, melainkan indikasi dari keadaan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi yang akan dijadikan sebagai alat ukur. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Marangkayu Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Kinerja
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang Ditindaklanjuti	Persen	77	100	142 %	Sangat Berhasil
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	70	100	129 %	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	100	100	Sangat Berhasil
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)	90,08	101%	Sangat Berhasil
4	Menyelesaikan Tindak Lanjut laporan Hasil Pemeriksaan Badan pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD tahun sebelumnya	Persen	100	67	67%	Cukup Berhasil
5	Matiritas Sistem engendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Level	3	3	100%	Sangat Berhasil
6	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	1	100%	Sangat Berhasil
7	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100%	Sangat Berhasil
8	Meningkatnya penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data Pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100%	Sangat Berhasil



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

9	Terlaksananya “Gerakan Etam mengaji (GEMA)” di perangkat darah	Jumlah Laporan Pelaksanaan “Gerakan Etam mengaji (GEMA)”	Laporan	48	18	100%	Sangat Berhasil
10	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	65,92 (Baik)	85,61%	Berhasil
11	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Persen	65	71,51	110%	Sangat Berhasil



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

KATA PENGANTAR		i
IKHTISAR EKSEKUTIF		ii
DAFTAR ISI		v
DAFTAR TABEL		vii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Keadaan Umum Wilayah	2
	C. Struktur Organisasi	7
	D. Tugas Pokok dan Fungsi	8
	E. Sumber Daya Aparatur	9
	F. Sumber Daya Keuangan	11
	G. Isu-Isu Strategis	11
	H. Sistematika Laporan Kinerja	15
BAB II	PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	16
	A. Perencanaan Kinerja	16
	1. Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara	17
	2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	18
	3. Strategi dan Arah Kebijakan	19
	4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	21
	B. Perjanjian Kinerja	23
	C. Alokasi Anggaran Tahun 2023	28
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	32
	A. Capaian Kinerja Organisasi	32
	1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	35
	2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	35
	3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	36



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

4	Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standarnasional (jika ada)	36
5	Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan	36
6	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	36
7	Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	36
B.	Realisasi Anggaran	37
BAB IV	PENUTUP	40
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah di Kecamatan Marangkayu	3
Tabel 1.2	Peta Wilayah	4
Tabel 1.3	Jumlah RT.....	5
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk.....	6
Tabel 1.4	PNS berdasarkan Pendidikan	9
Tabel 1.5	PNS berdasarkan Golongan	10
Tabel 1.6	PNS berdasarkan Eselon	10
Tabel 1.7	PNS berdasarkan Jabatan	11
Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026	18
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Marangkayu Tahun 2021-2026.....	19
Tabel 2.3	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Marangkayu.....	20
Tabel 2.4	Keterkaitan Sasaran dengan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025.....	21
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Kecamatan Marangkayu Tahun 2025.....	22
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran Kecamatan Marangkayu Tahun 2025.....	23
Tabel 2.7	Alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Marangkayu Tahun 2025.....	24
Tabel 2.9	Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	25
Tabel 3.1	Kategori Hasil Pencapaian Sasaran / Program / Kegiatan	32
Tabel 3.2	Realisasi Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah.....	32
Tabel 3.3	Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	32
Tabel 3.4	Analisa Survey Tahun 2025.....	34
Tabel 3.5	Perbandingan realisasi kinerja sasaran perangkat daerah 2025.....	37
Tabel 3.6	Perbandingan Target dan realisasi tahun 2024 sampai dengan 2025.....	39
Tabel 3.7	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka panjang.....	40
Tabel 3.8	Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Target dan Realisasi Tahun 2024	41



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

Tabel 3.9	Perbandingan realisasi kinerja kecamatan Marangkayu dengan realisasi IKN ke nasional.....	42
Tabel 3.10	Tabel keberhasilan / kegagalan kinerja utama.....	45
Tabel 3.11	Faktor pendukung dan penghambat realisasi kenpa	53
Tabel 3.12	Tabel efisiensi di sumberdaya.....	55
Tabel 3.13	Tabel Realisasi anggaran.....	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Rangkaian sistemik tersebut meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Kecamatan Marangkayu dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun:

- 1) Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Marangkayu Tahun 2021-2026;
- 2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Marangkayu Tahun 2025;
- 3) Rencana Aksi Kecamatan Marangkayu Tahun 2025;
- 4) Pohon Kinerja Tahun 2025
- 5) Laporan Monev e-Pantau Tahun 2025
- 6) Rencana Kerja(Renja)dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Marangkayu Tahun 2025; dan
- 7) Perjanjian Kinerja (PK) Camat Marangkayu Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi perangkat daerah diwajibkan menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **Kecamatan Marangkayu Tahun 2025**

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Marangkayu Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Marangkayu
2. Mendorong Kecamatan Marangkayu di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Marangkayu untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Marangkayu di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

B. Keadaan Umum Wilayah

Wilayah Kecamatan Marangkayu secara geografis terletak di daerah khatulistiwa dan berada pada posisi antara 117°06'BT–117°30' BT dan 0°13'LS–0°07'LS. Kecamatan Marangkayu dengan ibu kota Desa Sebuntal merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Muara badak dengan tekstur daerahnya merupakan daerah berdataran rendah yang berasal dari vegetasi hutan primer dan iklim lingkungan tropika basah yang memiliki debit curah hujan yang cukup tinggi dan hampir tidak ada bulan kering sepanjang tahun. Kondisi curah hujan per bulannya rata-rata 132,30 mm dan hari hujan berkisar 12 hari per bulan di tahun 2025.

Kecamatan Marangkayu terdiri dari 11 Desa yang luas wilayah keseluruhannya sekitar 1.165,71 Km². Letak kota kecamatan Marangkayu dari ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara (Tenggarong) berjarak sekitar 120 Km. Berikut merupakan daftar nama Desa beserta luasnya yang berada di wilayah kerja Kecamatan Marangkayu :

Selain itu, Kecamatan Marangkayu merupakan wilayah perbatasan dari Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Bontang. Secara administratif, batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kota Bontang
Sebelah Selatan	: Kec. Muara Badak
Sebelah Barat	: Kec. Sebulu dan Kec. Muara Kaman
Sebelah Timur	: Selat Makassar

Desa yang paling jauh dari kantor camat adalah desa Perangat Baru yang berjarak 35 km dan Perangat Selatan yang berjarak 32 km.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

b. Topografi

Kecamatan Marangkayu terletak disepanjang pesisir pantai laut Sulawesi dengan ketinggian daratan berada pada 0-150 meter dari permukaan laut. Keadaan tanah daerah bergelombang dengan daratan rendah berawa dengan perbukitan yang rendah yang di tumbuh dengan hutan mangrove

Tabel 1.1 : Luas Wilayah di Kecamatan Marangkayu

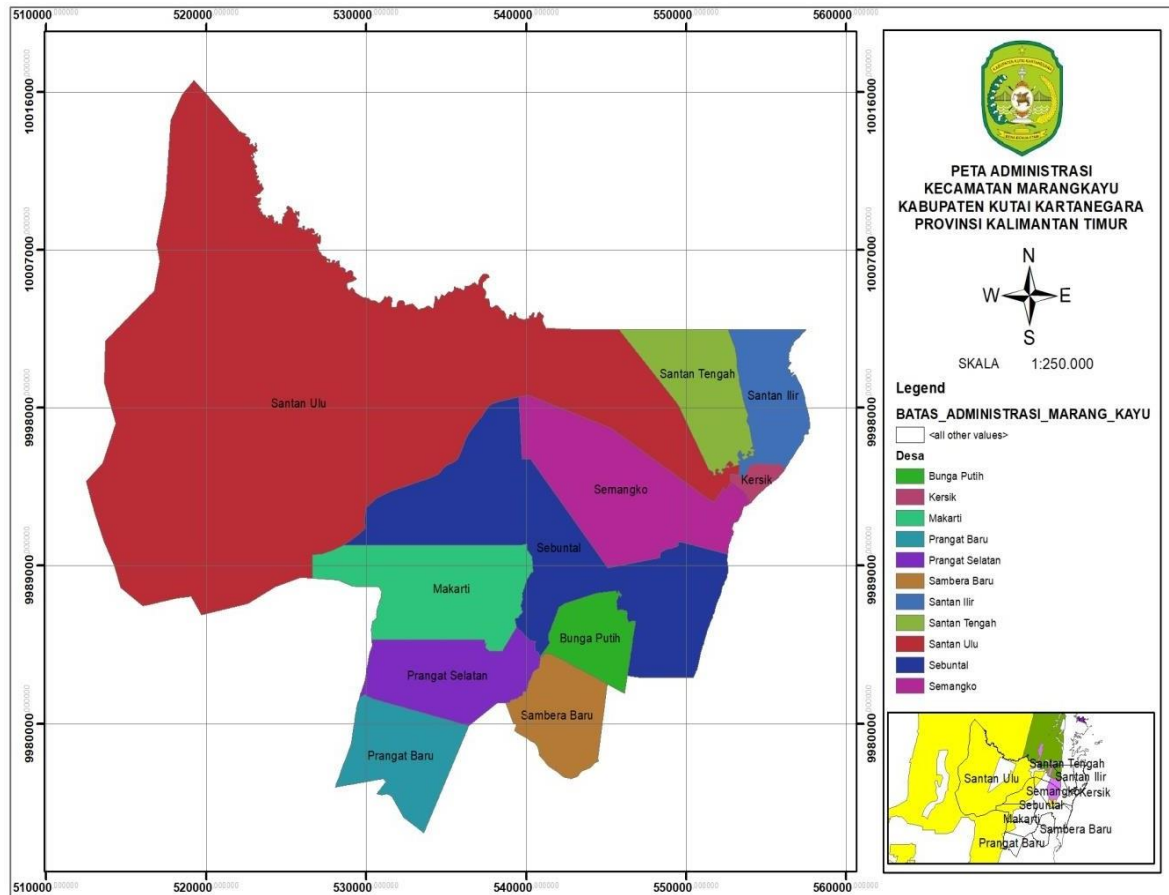
Desa/Kelurahan	Luas (km ²)	%	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]
1. Perangat Baru	6,51	0,86	Desa
2. Bunga Putih	8,50	0,73	Desa
3. Perangat Selatan	10,00	0,86	Desa
4. Makarti	30,00	2,57	Desa
5. Sebuntal	190,47	16,34	Desa
6. Kersik	58,26	5,00	Desa
7. Santan Ilir	97,38	8,35	Desa
8. Santan Tengah	136,27	11,69	Desa
9. Santan Ulu	604,83	51,89	Desa
10. Sambera Baru	1,50	0,13	Desa
11. Semangko	18,50	1,59	Desa
JUMLAH	1.165,71	100,00	

Sumber : Kecamatan Marangkayu Dalam Angka, 2025



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

Gambar 1.2. Peta Wilayah Administratif Kecamatan Marangkayu



Wilayah Kecamatan Marangkayu terdiri dari 11 Desa dan 161 Rukun Tetangga (RT). Desa yang memiliki RT terbanyak adalah Desa Subuntal Sanga Dalam dengan jumlah sebanyak 30 RT, sedangkan kelurahan yang memiliki jumlah RT paling sedikit adalah Desa Kersik dengan jumlah sebanyak 4 RT.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

Tabel 1.3:
Jumlah RT Kecamatan Marangkayu

NO	DESA	RUKUN WARGA (RW)	RUKUN TETANGGA (RT)
1	Perangat Baru		10
2	Bunga Putih		12
3	Perangat Selatan		16
4	Makarti		15
5	Sebuntal		30
6	Kersik		4
7	Santan Ilir		12
8	Santan Tengah		13
9	Santan Ulu		20
10	Sambera Baru		16
11	Semangko		13
JUMLAH		0	161

Sumber : Kecamatan Marangkayu Dalam Angka, 2025

Penduduk Kecamatan Marangkayu pada akhir tahun 2025 berjumlah $\pm$ 8.819 kepala keluarga atau $\pm$ 30.744 jiwa.

Sedangkan persentase jumlah penduduk Kecamatan Marangkayu berdasarkan Desa adalah :

- Desa Perangat Baru dihuni oleh 3.6 % dari jumlah penduduk;
- Desa Bunga Putih dihuni oleh 5.8 % dari jumlah penduduk;
- Desa Prangat Selatan dihuni oleh 5.3 % dari jumlah penduduk;
- Desa Makarti dihuni oleh 8.1 % dari jumlah penduduk;
- Desa Sebuntal dihuni oleh 20.9 % dari jumlah penduduk;
- Desa Kersik dihuni oleh 4.0 % dari jumlah penduduk;
- Desa Santan Ilir dihuni oleh 7.2 % dari jumlah penduduk;
- Desa Santan Tengah dihuni oleh 9.7 % dari jumlah penduduk;
- Desa Santan Ulu dihuni oleh 16.6 % dari jumlah penduduk;
- Desa Sambera Baru dihuni oleh 8.1 % dari jumlah penduduk;
- Desa Semangko dihuni oleh 11.4 % dari jumlah penduduk;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

Adapun tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Marangkayu berdasarkan jumlah penduduk adalah sebesar 21.8 jiwa/km².

3. Sumber Daya Alam

a. Jenis Tanah

Sebagian besar wilayah Kecamatan Marangkayu terdiri dari jenis tanah kering, tanah basah, dan tanah sawah. Dengan demikian umumnya banyak digunakan untuk keperluan pertanian, perkebunan. Sedangkan jenis tanah kering umumnya digunakan sebagai lahan pemukiman.

b. Iklim

Kecamatan Marangkayu berada di garis katulistiwa sehingga karakteristik iklimnya termasuk jenis tropis basah dengan ciri khas curah hujan tinggi dengan penyebaran yang merata sepanjang tahun. Dengan demikian tidak terdapat pergantian musim yang jelas antara musim hujan dan musim kemarau.

c. Sumber Daya Air

Potensi sumber daya air yang menonjol dari sungai-sungai yang berada di wilayah Kecamatan Marangkayu. Sebagian masyarakat memanfaatkan air tanah terutama masyarakat yang berada di wilayah yang tidak terjangkau oleh PDAM. Namun sebagian masyarakat yang dapat dijangkau oleh layanan PDAM, memanfaatkan air bersih dari PDAM.

Tabel 1.4. Jumlah Penduduk Kecamatan Marangkayu Semester II Tahun 2025

NO.	NAMA DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P
1	Perangat Baru	614	499	1.113
2	Bunga Putih	863	785	1.684
3	Perangat Selatan	1.059	1.002	2.061
4	Makarti	1.200	1.255	2.455
5	Sebuntal	3.156	3.110	6.266
6	Kersik	618	566	1.184
7	Santan Ilir	1.226	1.091	2.217
8	Santan Tengah	1.495	1.494	2.989
9	Santan Ulu	2.686	2.237	4.923
10	Sambera Baru	820	823	1.663
11	Semangko	2.168	2.057	4.225
JUMLAH		15.805	14.939	30.744

Sumber Data: Kantor Camat Marangkayu

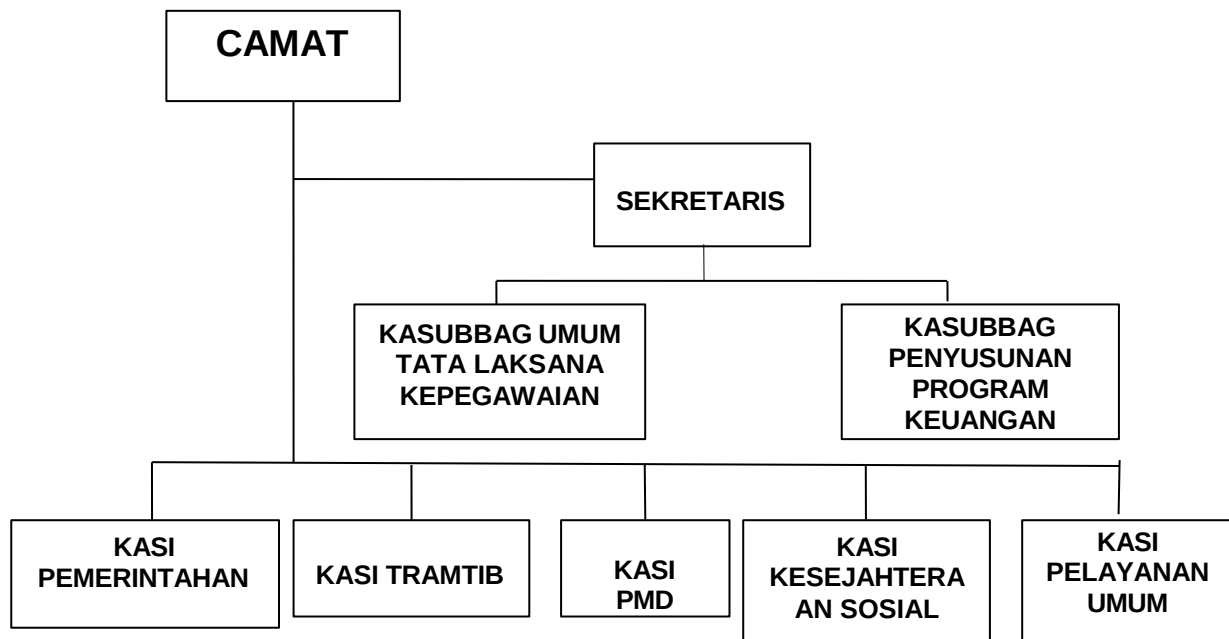


C. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MARANGKAYU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Struktur organisasi Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 69 tahun 2017 Bab III pasal 5 terdiri dari 9 (sembilan) bidang dengan rincian sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Camat merupakan pimpinan sekretariat yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
3. Seksi-Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - e. Seksi Pelayanan Umum
4. Kelompok Jabatan Struktural



Pembentukan Kecamatan Marangkayu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan struktur organisasi diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69



Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat; Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perangkat kecamatan terdiri dari :

1. Sekretariat,
 - a. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
2. Seksi Pemerintahan;
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pelayanan Umum;
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Kelurahan membawahkan :
 - a. Lurah
 - b. Sekretaris Lurah;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan; dan
 - e. Seksi Sosial.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.



Camat melaksanakan tugas dan fungsi:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan.

D. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Marangkayu per 31 Desember 2025 sebanyak 22 orang. Perincian jumlah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.5. PNS berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	SD	0	0	0	0,00%
2	SLTP	0	0	0	0,00%
3	SLTA	3	4	7	35,00%
5	D-I	0	0	0	0,00%
6	D-II	0	0	0	0,00%
7	D-III	0	2	2	10,00%
8	D-IV	0	0	0	0,00%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

9	S1	5	6	11	50,00%
10	S2	1	0	1	5,00%
11	S3	0	0	0	0,00%
Jumlah		9	11	21	100%

b. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.6. PNS berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	I	0	0	0	0%
2	II	3	5	8	45%
3	III	3	5	8	35%
4	IV	2	1	4	20%
Jumlah		9	11	21	100%

c. Berdasarkan Eselon

Tabel 1.6. PNS berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	II.a	0	0	0	0,00%
2	II.b	0	0	0	0,00%
3	III.a	0	1	1	11,11%
4	III.b	0	1	1	11,11%
5	IV.a	2	2	2	55,55%
6	IV.b	1	1	1	22,22%
Jumlah		3	5	8	100%



d. Berdasarkan Jenis Jabatan

Tabel 1.7. PNS berdasarkan Jabatan

No.	Jenis Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	Struktural	4	4	8	45,00%
2	Fungsional Guru	0	0	0	0,00%
3	Fungsional Non Guru	0	0	0	0,00%
4	Pelaksana	5	8	13	55,00%
Jumlah		9	12	21	100,00%

E. Sumber Daya Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Marangkayu pada Tahun 2025 berasal dari APBD

Pemerintah Daerah. Pada Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Marangkayu mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. **30.798.083.195,-** yang diperuntukkan untuk belanja langsung dan belanja tak langsung serta untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program pendukung dengan rincian 5 (lima) program, 15 (sepuluh) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan.

F. Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Kecamatan Marangkayu, antara lain sebagai berikut

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai



pada tatanan pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain :

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Profesional;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu;
- l. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan PATEN. PATEN itulah perwujudan tekad Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang penyusunannya internal dan Standar Pelayanan Publik (SPP) di



kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat. Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Pengambilan kebijakan perangkat daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses musyawarah pembangunan (Musrenbang) jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui

musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada undang-undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia dan warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kutai Kartanegara sehingga kecamatan bersifat fasilitasi.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh seksi pemerintahan dan ketertiban dan ketentraman umum, seksi pemberdayaan masyarakat dan seksi perekonomian dan pembangunan serta kelurahan di wilayah Kecamatan Marangkayu yang terdiri dari 11 Desa Kecamatan Marangkayu bersama pemerintah Desa bersama,-sama memberikan penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada



saat pelaksanaan kegiatan.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara.

d. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap perangkat daerah. Output dari program yang dilakukan oleh perangkat daerah kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender (pengarusutamaan gender) dimulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Marangkayu. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara kepada camat.

e. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh



karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik. Sebagian informasi publik tidak dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik sebagaimana informasi yang lainnya. Penerapan keterbukaan publik yang sudah dilakukan di Kecamatan Marangkayu adalah pengelolaan web kecamatan dengan alamat marangkayu.kukarkab.go.id yang berisi informasi kinerja Kecamatan Marangkayu keseluruhan yaitu SDM, program dan kegiatan yang dilaksanakan, perjanjian kinerja, laporan-laporan dan dokumentasi, yang semua nya selalu diperbarui.

G. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup Lampiran

Lampiran ;



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Marangkayu merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang didalamnya menjabarkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan pada Kecamatan Marangkayu yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

1. Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan merupakan tugas umum pemerintah selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka rumusan Visi dan Misi Kecamatan Marangkayu merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026. Dengan mempertimbangkan kondisi obyektif, potensi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, maka Visi yang akan di capai serta Misi yang akan dilakukan adalah untuk memberikan arahan yang jelas terhadap program kegiatan dalam menjalankan tugas pelayanan OPD serta untuk menggambarkan arah pembangunan pada akhir periode perencanaan selama 5 (lima) Tahun kedepan. Visi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang hendak dicapai yaitu :





**VISI MISI KUKAR IDAMAN
2021 - 2026**

VISI

**Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara
yang Sejahtera dan Berbahagia**

SEJAHTERA adalah kondisi masyarakat kutai kartanegara yang mudah mengakses hak hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan

BERBAHAGIA adalah kondisi masyarakat kutai kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketentraman, diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian dan gotong royong, belandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

MISI

1. MEMANTAPKAN BIROKRASI YANG BERSIH, EFEKTIF, EFESIEN DAN MELAYANI;
2. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA, UNGGUL DAN BERBUDAYA;
3. MEMPERKUAT PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF;
4. MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH;
5. MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN.



Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Marangkayu adalah Misi ke-1 yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani. kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Marangkayu Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan Kecamatan Marangkayu dalam jangka waktu

1 sampai 5 tahun. Mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka Tujuan yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Marangkayu adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel.

Tabel 2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

VISI :				
“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”				
MISI	TUJUAN		SASARAN	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan yang	Indeks Kepuasan Pelayanan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti
	Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Kecamatan		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum



b. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan pada Tujuan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Marangkayu, maka Sasaran yang hendak dicapai terlihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2. 2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Marangkayu Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan					
					2021	2022	2023	2025	2025	2026
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	75	75,5	76	76,5	77	78
			Persentase capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	0	55	60	65	70	75
			Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	0	0	0	0	0	0
			Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	0	0	0	0	0	0

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan perangkat daerah merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Adapun strategi dan arah kebijakan Kecamatan Marangkayu Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan

VISI (RPJMD)	: “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”
MISI (RPJMD)*	: 1, Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;

No.	Strategi Kecamatan Marangkayu	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
		Meningkatkan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
		Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
3.	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Meningkatkan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4.	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6.	Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan	Meningkatkan fasilitas penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran pada Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada tabel 2.4 berikut ini:





Tabel 2.4
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perjanjian kinerja Kecamatan Marangkayu Tahun 2025 sebagaimana terlihat pada tabel 2.5 berikut:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas dan Jangkauan Pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	77
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	70
2	Meningkatnya Ketertiban Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
4	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Level	3
6	Meningkatnya Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

7	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
8	Meningkatnya penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
9	Terlaksanannya "Gerakan Etam mengaji (GEMA) di perangkat daerah		Laporan	48
10	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	Nilai SAKIP Kbupaten	Nilai	77
11	Meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupeten	Nilai	65

C. Alokasi Anggaran Tahun 2025

Pada tahun Anggaran 2025, Kecamatan Marangkayu melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD sebesar **Rp. 30.762.002.552** Melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2025 yang bersumber dari APBDP meningkat sebesar **Rp. 30.788.083.195**

Tabel 2. 6. Alokasi Anggaran Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Alokasi Anggaran	Rp. 30.762.002.552	Rp. 30.788.083.195	Rp. 16.080.643



1. Alokasi Anggaran Belanja

Perencanaan pelaksanaan anggaran belanja dan setelah perubahan anggaran belanja Kecamatan Marangkayu Tahun 2025 dengan rincian pada tabel berikut ini:

2.7. Alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Belanja Operasi	30.387.638.237	30.413.718.880	26.080.643
Belanja Modal	374.364.315	374.364.315	-
Total	30.762.002.552	30.788.083.195	26.080.643

Perencanaan pelaksanaan anggaran Tahun 2025, Kecamatan Marangkayu mengalokasikan anggaran berdasarkan per sasaran (IKU) sebagaimana pada tabel 2.8 berikut ini:

2. Alokasi Anggaran per Program

Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Marangkayu Tahun 2025 merencanakan 5 (lima) program, 14 (lima belas) kegiatan, dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan dengan rincian pada tabel 2.9 berikut ini:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

Tabel 2. 9. Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN				
7.01.1.03.0.00.17.0000 KECAMATAN MARANGKAYU				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.678.474.432	6.581.190.998	416.090.087
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	302.000.000	302.500.000	-
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.000.000	70.000.000	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000	2.500.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000	2.500.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.000.000	35.000.000	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	30.000.000	
6	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	150.000.000	150.000.000	
7	Pelaksanaan Forum Perangkat daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang di Ampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.500.000	12.500.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.707.557.248	4.123.647.335	416.090.087
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.648.012.248	4.064.102.335	416.090.087
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	10.000.000	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	49.545.000	49.545.000	
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi anggaran	12.500.000	12.500.000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	204.201.400	24.201.400	
12	Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	12.493.400	12.493.400	-
13	Pengamanan Barang Milik Daerah	116.700.000	116.700.000	-
14	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	25.008.000	25.008.000	-
15	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	20.000.000	-





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000	30.000.000	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	620.000.000	620.000.000	
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.000.000	18.000.000	-
18	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	40.000.000	40.000.000	-
19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.622.000	49.622.000	-
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.350.000	49.350.000	
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.288.200	31.288.200	-
22	Fasilitasi Kunjungan Tamu	70.000.000	70.000.000	-





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000	350.000.000	-
24	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	111.442.000	111.442.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	374.364.315	374.364.315	
25	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	50.764.900	50.764.900	
26	Belanja Modal Mebel	97.684.415	97.684.415	-
27	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	175.915.000	175.915.000	-
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000	-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	796.434.996	811.434.996	15.000.000
29	Penyedia Jasa Surat menyurat	2.500.000	2.500.000	
30	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	343.196.000	493.196.000	150.000.000
31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	450.738.996	307.949.746	(142.789.250)
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.000.000	40.000.000	
32	Pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	40.000.000	40.000.000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	23.504.907.097	23.504.907.097	
8	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan	321.650.000	321.650.000	
33	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	125.000.000	125.000.000	
34	Peningkatan efektifitas pemerintah di tingkat kecamatan	196.650.000	196.650.000	
9	Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Kecamatan	50.000.000	50.000.000	
35	Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	50.000.000	50.000.000	
10	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		22.532.957.097	
36	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		22.532.957.097	





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

37	Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan non perizinan	600.300.000	600.300.000	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	361.600.000	361.600.000	-
11	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100.000.000	100.000.000	-
38	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	75.000.000	75.000.000	-
39	Peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	50.000.000	25.000.000	-
12	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	261.600.000	261.600.000	-
40	Penyelenggaraan Lembaga kemasyarakatan	261.600.000	261.600.000	-
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	140.385.100	140.385.100	-
13	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	140.385.100	140.385.100	-
41	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	140.385.100	140.385.100	-
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	210.000.000	210.000.000	-
14	Penyelenggaraan urusan pemerintah Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	210.000.000	210.000.000	-
42	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	210.000.000	210.000.000	-
	JUMLAH	30.762.002.552	30.788.083.195	26.060.843



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kecamatan Marangkayu selaku pengemban amanah masyarakat di wilayah Kecamatan Marangkayu melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Pengumpulan data Kinerja dilakukan tiap Kecamatan sebagai acuan untuk membuat program yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan kegiatan. Laporan tersebut diatas dapat memberikan gambaran mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan Marangkayu.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk mengukur persentase capaian kinerja dari masing-masing indikator maka ada dua jenis rumus yang digunakan yaitu:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pencapaian} = 1 + \frac{\text{target} - \text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja (PK).

Selanjutnya untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa **skala ordinal**. Adapun skala ordinal yang digunakan dalam laporan akuntabilitas ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Kategorisasi Hasil Pencapaian Sasaran/Program/Kegiatan

Skala Ordinal Pengukuran Sasaran		
No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1	≥95	Sangat Berhasil
2	80 s/d <95	Berhasil
3	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4	<50	Kurang Berhasil



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

a. Realisasi Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah

Realisasi target kinerja **Tujuan Renstra** Kecamatan Marangkayu pada semester 2 tahun 2025 yaitu sebesar **90,03** Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja **Sangat Tinggi**.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel : 3.2

Realisasi Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	77	90,03	129%	SANGAT BERHASIL	Realisasi dibagi dengan Target



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

Adapun capaian antara target dan realisasi kinerja tujuan tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Sesuai Perjanjian Kinerja Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian	Formulasi Perhitungan
A Indikator Kinerja Utama								
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	77	100	129%	Sangat Tinggi	$= 100/77, *100\%$
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	70	100	142%	Sangat Tinggi	$= 100/65 * 100\%$
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)	90,03	101%	Sangat Tinggi	$= 90,03/88,30 * 100\%$
4	Menyelesaikan Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	67	100%	Tinggi	$= 67/100 * 100\%$
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	level	3	3	100%	Sangat Tinggi	$= 3/3 * 100\%$
6	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	1	100%	Sangat Tinggi	$= 1/1 * 100\%$



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

7	Tindak lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak lanjut pengaduan SP4N lapor	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	= 100/100 * 100%
8	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu data Indonesia	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	= 100/100 * 100%
9	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji" (GEMA)	Laporan	48	48	100%	Sangat Tinggi	= 48/48 * 100%
10	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Insatnsi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	65,92 (baik)	85%	Tinggi	= 65,92/77 100%
11	Meningkatkan Manajemen birokrasi yang efektif, Efisien, Inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB kabupaten	Nilai	65	71,51	110%	Sangat Tinggi	= 71,51/100* 100%
		Rata - Rata				GG,94,5 %	Sangat Tinggi	

Penjelasan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama

1.1 Persentase keluhan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan yang ditindak lanjuti

Target kinerja "Indikator Kinerja ke-1" tahun 2025 yaitu memperoleh nilai target 77 dan realisasinya sebesar 100 atau capaian kinerja yang diperoleh sebesar 129 %, target kinerja sangat berhasil . Pemenuhan pelayanan masyarakat terhadap Pelayanan pelaksanaan PATEN di Kecamatan Marangkayu masih perlunya peningkatan pelayanan baik dalam kelengkapan sarana dan prasarana dan peningkatan Sumber Daya Manusia untuk peningkatan ditahun mendatang.

1.2 Persentase capaian Ketentraman dan ketertiban Umum

tahun 2025 yaitu Persentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum; dengan target 70 mendapatkan capaian 100 dan persentase realisasi 142% target kinerja sangat berhasil



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

Jumlah Pelanggaran yang dapat berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dapat diselesaikan, Kegiatan penertiban berjalan sesuai aturan yang berlaku dimana pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dengan instansi vertikal seperti TNI dan POLRI. Adapun kendala yang di hadapi yaitu masih kurangnya staf pendukung di Trantib.

Tabel 3.4
Analisa Hasil Survey Tahun 2025 Semester II

No	Unsur Pelayanan	
1.	Kessuaian Persyaratan	3,72
2	Prosedur Pelayanan	3,61
3	Waktu pelayanan	3,55
4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	3,99
5	Produk layanan	3,51
6	Kompetensi Petugas	3,5
7	Perilaku pelaksana	3,49
8	Sarana dan prasarana	3,99
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,41
Indeks Pelayanan		
Mutu Pelayanan		
Kinerja Unit Pelayanan		

Pada Tahun 2025 seluruh jenis layanan kepada masyarakat yang di berikan tidak terdapat keluhan dari masyarakat penerima layanan.

2. Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan kegiatan dialog atau diskusi antara penyelenggara layanan publik dengan masyarakat. FKP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Target Indikator Kinerja untuk pelaksanaan forum Konsultasi Publik target 100% dengan realisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 100%



3. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik dengan baik dan sesuai yang di ukur melalui survey IKM. Target Indikator Kinerja dengan nilai 88,30 dan dapat direalisasikan dengan nilai 90,03 dengan capaian Kinerja 101% atau Sangat Tinggi

4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan pemeriksa Keuangan (BPK)

Target Indikator Kinerja Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan pemeriksa Keuangan (BPK) atas audit LKPD 5 tahun terakhir denag target 100% terealisasi 67% dengan capaian 67% disebabkan oleh pengembalian atau STS ke Kas daerah dari Pihak Ketiga atas temuan hasil pemeriksaan yang belum rampung atau selesai.

5. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP merupakan sistem yanag di selenggarakan oleh oleh pemerintah untuk pengendalian pelaksanaan pelaporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan. Target Indikatr Kinerja SPIP dengan target nilai 3 terealisasi 3 sehingga capaian kinerja 100% atau Sangat Tinggi. Nilai tersebut berdasarkan Laporan Penilaian Maturitas Intern Pemerintah (SPIP).

6. Meningkatnya Partisipasi Perangkat daerah dalam Pekan Inovasi Daerah

Indikator kinerja tambahan ke-5 yaitu Peningkatan Presetasi inovasi di Kecamatan Matrangkayu target yang ditetapkan yaitu sebesar 1 Kegiatan. Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 100% dari target sebesar 1 inovasi sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dengan predikat Sangat Berhasil. Adapaun Judul Inovasi Kecamatan Marangkayu adalah PATEN CERMAT.

7. Tindak Lanjut Pengaduan SP4AN Lapor

Target kinerja indikator tindak lanjut pengaduan S4AN lapor dengan target 100% 2025 yaitu sebesar 100%, realisasi target yang tercapai yaitu sebesar 100% dengan kreteria penilaian Sangat Berhasil.



8. Penyelenggaran Satu Data Indonesia

Target kinerja indikator tambahan ke-7 pada tahun 2025 sebesar 100% yaitu realisasi kinerja pada indikator ini sebesar 100% dengan kriteria penilaian Sangat Berhasil. Ketepatan waktu dalam input, data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan akan memudahkan dalam akses data.

9. Terlaksananya “Gerakan etam Mengaji (GEMA)”

Target kinerja indikator Gerakan Etam mengaji (GEMA) pada tahun 2025 yaitu 48 Laporan, realisasi kinerja pada indikator ini sebesar 48 dengan capaian kinerja 100%. Gerakan Etam Mengaji bertujuan membangun karakter religius.

10. Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Pemerintah

Indikator kinerja meningkatnya Kinerja Penyelenggara Pemerintah yaitu Nilai SAKIP Kabupaten, target yang ditetapkan untuk nilai 77, dan realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 65.59 dari target yang ada dengan predikat Berhasil.

11. Meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan meleyani

Indikator Kinerja tersebut yaitu Indeks RB Kabupaten dengan target 65 realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 71,51 dari target yang ada dengan predikat Sangat Berhasil.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

Dari tabel capaian Realisasi Kinerja Tahun 2025 diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan” dengan Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti” dari keluhan yang masuk dan ditangani dibidang Pelayanan mencapai 100% sementara keluhan yang masuk melalui SP4N Lapor untuk tahun 2025 0 Laporan dengan capaian target 100 %. sedangkan indikator Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum telah tercapai sebesar 100% karena kondisi yang kondusif dan.

Tabel : 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Keterangan	Capaian Kinerja
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	2022	75	100	Meningkat	133%
				2023	76	100	Meningkat	131%
				2024	76,5	100	Meningkat	130%
				2025	77	100	Menurun	129%
				2026	78			

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Perangkat Daerah

Realisasi target kinerja sasaran Kecamatan Camat Marangkayu tahun 2025 jika dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya terjadi sedikit penurunan. Terdapat Indikator kinerja tambahan yang menjadi target tambahan sesuai dengan Perjanjian Kinerja kepala Perangkat Daerah. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya (tahun 2024) secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Membandingkan Target dan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.

Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

oleh Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2024			2025		
			Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	75,5	100	132%	77	100	129%
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	65	100	153%	70	100	142%
2.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	100	100	100%	100	100	100%
3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	72,7	99,72	137%	80,30	90,03	101%
4.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	100	100	100%	100	67	67%
5.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	-	-	-	3	3	100%
6.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	1	100%	1	1	100%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

7.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	100	100	100%	100	100	100%
8.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	100	100	100%	100	100	100%
9.	Terlaksanya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	48	48	100%	48	48	100%
10.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	73	65,92	90%	77	65,59	85%
11.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	64	60,12	94%	65	71,51	110%



2. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra (Perencanaan Strategis)
3. Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2025, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				Realisasi dan Capaian (%)			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	75,5	76	76,5	77	100 132%	100 131%	100 130%	100 129%
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	55	60	65	70	100 181%	100 166%	100 153%	100 142%
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Tabel : 3.8
Perbandingan Antara Target Renstra dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi	% Capaian	Kategori Kinerja
A	Indikator Kinerja Utama						
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	Persen	77	100	129%	SANGAT BERHASIL
		Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	70	100	142%	SANGAT BERHASIL
B	Indikator Kinerja Tambahan						
1	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	100	100%	SANGAT BERHASIL
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88.3	99,03	101%	SANGAT BERHASIL
3	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	100	100%	SANGAT BERHASIL
4	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3	3	100%	SANGAT BERHASIL
5	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	1	100%	SANGAT BERHASIL
6	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100%	SANGAT BERHASIL
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100%	SANGAT BERHASIL
8	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48	48	100%	SANGAT BERHASIL

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

9	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	65.59	85%	BERHASIL
10	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65	71.51	110%	SANGAT BERHASIL
						94%	SANGAT BERHASIL

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Kecamatan Marangkayu (Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat) Dengan Realisasi Nilai IKM Kecamatan Lain di Tingkat Nasional.

Tabel 3.9

No	Tujuan/sasaran	Indikator	Target	Capaian	Realisasi	Keterangan
1	Meningkatnya Kulaitas dan Jangkauan Publik	Persentase Keluhan masyarakat terhadap pelayanan	77	100	129%	Kecamatan Marangkayu
		Persentase kemandirian dan ketertiban umum	70	100	142%	Kecamatan Marangkayu
2	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Indeks kepuasan Masyarakat	83	83,89	101%	Kecamatan Gucialit
		Nilai Sinergitas Kinerja kecamatan	52	63,80	122%	Kecamatan Gucialit

Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Marangkayu dengan Kecamatan Gucialit Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan	83	83.89%	101%
		2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	52	63,80%	122%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pengukuran pencapaian kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



visi dan misi. Evaluasi dan analisis kinerja terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan sangat penting dilaksanakan guna memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Hal ini bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang. Adapun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah di perjanjikan

Tabel.3.10

Keberhasilan/Kegagalan indkator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi %	Capaian	Kategori Kinerja
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	76,5	100	130,71%	SANGAT BERHASIL
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	65	100	153,846%	SANGAT BERHASIL
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	0	0	0	KURANG BERHASIL
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	0	0	0	KURANG BERHASIL
		Kewenangan Kecamatan				

Hambatan Secara Umum yaitu perlunya perbaikan aksesibilitas jalan antar Desa ke Kecamatan, aksesibilitas antar desa di Kecamatan Marangkayu untuk memudahkan dan meningkatkan pelayanan publik.

Usulan oleh pemerintah terkait perbaikan aksesibilitas melalui Musrenbang

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dapa

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Tabel : 3.11
Faktor Pendukung Dan Penghambat Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
A	Indikator Kinerja Utama							
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	77	100	129%	Ada Penambahan Perangkat Dari Instansi Terkait	Kondisi Jaringan Internet yang tidak stabil, perbaikan kerusakan peralatan (alat perekaman) yang harus memakan waktu cukup lama dikarenakan harus dibawa ke Kabupaten, serta apabila Listrik/PLN padam jaringan internet juga padam
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	70	100	142%	Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan berjalan dengan baik antara Pemrintah Kecamatan dengan TNI dan Polri.	Kurangnya staf pendukung yang ada di bagian trantib
B	Indikator Kinerja Tambahan							
2	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	100	100%	FKP yaitu musrenbang Tingkat kecamatan berjalan sesuai dengan RKPD Kecamatan	Kurangnya sosialisasi tentang Pelayanan Publik
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88.3	90,03	101%	Kegiatan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik	Kondisi Jaringan Internet yang tidak stabil, perbaikan kerusakan peralatan (alat perekaman) yang harus memakan waktu cukup lama dikarenakan harus dibawa ke Kabupaten, serta apabila Listrik/PLN padam jaringan internet juga padam
4	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	67	67%	dukungan pimpinan dan arahannya kepada bawahannya untuk selalu menjalankan pekerjaan dengan baik	Belum 100 persen menindaklanjuti hasil audit dalam pengembalian STS ke kas daerah
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3	3	100%	Laporan Maturitas SPIP pada perangkat Daerah	masih kurangnya SDM dan ASN yang ada
6	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	1	100%		

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

7	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	86	100%		
8	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100%	dukungan pimpinan dan arahnya kepada bawahannya untuk selalu menjalankan pekerjaan dengan baik	masih kurangnya SDM dan ASN yang ada
9	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48	48	100%		
10	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	Nilai SAKIP kabupaten	persen	77	65,59	85%		
11	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65	71.51	110%		

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran.

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangi persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran dengan kategori penilaian yaitu :

- Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian sasaran indikator kinerja utama dan sasaran indikator kinerja tambahan dan persentase penyerapan anggaran dan rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Tabel : 3.12
Rincian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Tahun 2025

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi (Rp.)	Realisasi %	Ket.
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	129%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	23.290.428.097,70	21.040.422.183	90%	Efisien
2	Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	142%	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	140.385.100	140.000.000	99%	Efisien
3	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	100%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	361.600.000	360.250.000	99%	Efisien
4	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	96%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.549.271.796	5.514.433.397	84%	Efisien
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)						
6	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah						
7	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor						
8	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia						
9	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah						
10	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani						
11	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	100%	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	210.000.000	129.550.000	61%	Efisien

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



7. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Untuk Tahun 2025 penyerapan anggaran Kecamatan Marangkayu mencapai 88,8% yaitu dari total anggaran Rp.30.798.083.195,- dan terealisasi sebesar Rp.27.409.492.990,- atau dengan kata lain perencanaan penganggaran sudah dilakukan dengan sangat baik. Sedangkan dana yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp.3.388.590.205. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dengan melihat prosentase pencapaian kinerja tahun 2025 dan total penyerapan anggaran yang telah dilakukan maka dapat dipastikan semua program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Kecamatan Marangkayu semuanya mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2025.

B. Realisasi Anggaran.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2025 sebesar 88,86% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 30.788.083.195,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.409.492.990,- . Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 dengan Pagu Rp.28.643.077.801,- dengan realisasi anggaran sebesar 27.412.037.990 capaian 99,70% yang berarti mengalami penurunan sebesar 10,84% yang disebabkan oleh kondisi keuangan Daerah sehingga terjadi utang senilai Rp.1.415.271.790,- berdasarkan LHR dari Isnpektorat Daerah : B-080/Itda/IP.I/700.1/II/2026 Tanggal 6 Februari 2026.

Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

Tabel 3.13
Realisasi Belanja Langsung Kantor Camat Marangkayu Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA PAGU	PERSENTASE
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN		30.788.083.195	27.367.812.319	3.430.270.876	88,8%
7.01.1.03.0.00.17.0000 KECAMATAN MARANGKAYU					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.549.271.796	5.514.433.397	1.034.838.399	84%
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	302.500.000	300.700.000	1.800.000	99%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.000.000	69.000.000	100.000	99%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000	2.500.000	-	100%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000	2.500.000	-	100%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.000.000	34.700.000	300.000	99%
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	29.800.000	200.000	99%
6	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	150.000.000	149.800.000	200.000	99%
7	Pelaksanaan Forum Perangkat daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang di Ampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.500.000	12.400.000	100.000	99%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.136.147.335	3.573.952.241	631.297.094	86%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.064.102.335	3.504.850.241	559.252.094	86%
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	9.602.000	398.000	96%
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	49.545.000	47.200.000	2.345.000	95%
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi anggaran	12.500.000	12.300.000	300.000	98%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	204.201.400	109.280.000	94.921.400	53%
12	Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	12.493.400	12.300.000	193.400	98%
13	Pengamanan Barang Milik Daerah	116.700.000	22.530.000	94.170.000	19%
14	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	25.008.000	24.700.000	308.000	99%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

15	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	19.950.000	50.000.	99%
16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000	29.800.000	200.000	99%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	688.414.000	641.170.000	47.244.000	93%
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.000.000	17.400.000	600.000	97%
18	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	40.000.000	39.850.000	150.000	99%
19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.622.000	0	49.622.000	0%
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.350.000	48.900.000	450.000	99%
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.288.200	31.000.000	288.200	99%
22	Fasilitasi Kunjungan Tamu	70.000.000	69.900.000	100.000	99%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000	348.970.000	1.030.000	99%
24	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	111.442.000	85.150.000	26.292.000	76%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	374.363.315	72.559.313	301.804.002	19%
25	Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	50.764.900	0	50.764.900	0%
26	Belanja Modal Mebel	97.684.415	22.919.980	74.764.435	23%
27	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	175.915.000	0	175.915.000	0%
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	49.639.000	361.000	99%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	803.645.746	776.911.843	26.733.903	97%
29	Penyedia Jasa Surat menyurat	2.500.000	2.500.000	0	100%
30	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	493.196.000	474.949.000	18.789.996	96%
31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	307.949.746	299.462.843	8.486.903	97%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.000.000	39.860.000	140.000	99%
32	Pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	40.000.000	39.860.000	140.000	99%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	23.290.428.097,7	21.040.422.183	2.250.005.914,70	90%
8	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan	321.650.000	240.475.000	81.175.000	75%
33	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	125.000.000	44.400.000	80.600.000	35%
34	Peningkatan efektifitas pemerintah di tingkat kecamatan	196.650.000	196.075.000	575.000	99%
9	Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Kecamatan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100%
35	Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	50.000.000	50.000.000	0	100%
10	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	22.918.778.097,70	20.749.947.183	168.828.914,70	91%
36	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	22.532.957.096,70	20.490.947.183	2.042.009.913,70	91%





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Marangkayu Tahun 2025

37	Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan non perizinan	365.821.000	259.000.000	106.821.000	78%
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	361.600.000	360.250.000	1.350.000	99%
11	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100.000.000	99.350.000	650.000	99%
38	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	75.000.000	74.950.000	50.000	99%
39	Peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	25.000.000	24.400.000	600.000	98%
12	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	261.600.000	260.900.000	700.000	98%
40	Penyelenggaraan Lembaga kemasyarakatan	261.600.000	261.600.000	700.000	98%
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	140.385.100	140.000.000	385.100	99%
13	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	140.385.100	140.000.000	385.100	99%
41	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	140.385.100	140.000.000	385.100	99%
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	210.000.000	210.000.000	80.450.270.876	61%
14	Penyelenggaraan urusan pemerintah Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	210.000.000	129.550.000	80.450.270.876	61% -
42	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	210.000.000	129.550.000	80.450.000.000	61%
JUMLAH		30.788.083.195,00	27.367.812.319,00	3.430.270.876	88,8%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan pada Tahun 2025 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

1. KESIMPULAN

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku. Capaian kinerja Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 90,03 atau capaian kinerja sebesar 90,03% dengan kategori kinerja sangat baik. Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 5 (Tiga) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 42 (empat puluh dua) Sub Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 88,8% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Realisasi IKM tahun 2025 (90,03).

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Capaian Kinerja nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan diperoleh sebesar 129% (Sangat Berhasil) dari target Nilai 77 dan diperoleh nilai 90.03%
2. Capaian kinerja Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar 142% (Sangat Berhasil) dari target 77% dan realisasi 100%
3. Capaian Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) sebesar 100% (sangat berhasil).
4. Capaian Kinerja Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD 67% (Cukup berhasil) dimana masih ada pengembalian yang belum rampung ke Kas Daerah

5. Capaian Kinerja Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah sebesar 100% (Sangat Berhasil).
6. Capaian Kinerja Jumlah Inovasi Perangkat Daerah sebesar 100% (Sangat Berhasil).
7. Capaian Kinerja Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor sebesar 100% (Sangat Berhasil).
8. Capaian Kinerja Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia Sebesar 100% (Sangat Berhasil).
9. Capaian Kinerja Gerakan Etam mengaji (GEMA) sebesar 100% (Sangat Berhasil)
10. Capaian Kinerja Nilai SAKIP Kabupaten sebesar 85% (Berhasil).
11. Capaian Kinerja Indeks RB Kabupaten sebesar 110% (Sangat Berhasil)

2. Perbaikan Kedepan

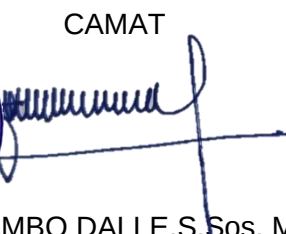
Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2025, maka rencana perbaikan kedepan dalam memperbaiki kinerja yang belum tercapai atau mencapai target yang telah ditetapkan pemenuhan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam penilaian SAKIP,

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2025, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, segala bentuk kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di kemudian hari.

Ditetapkan : Di Marangkayu

Tanggal : 23 Februari 2026

CAMAT



AR. AMBO DALLE, S. Sos, M.H.
NIP. 196907212001121003